

## **Analisis Kualitas SDM, Pengelolaan Keuangan, dan Kualitas Laporan Keuangan Di DINPERKIM Kota Magelang**

*(Analysis of Human Resources Quality, Financial Management, and Quality of Financial Reports in DINPERKIM Magelang City)*

**Nur Malikhah<sup>1</sup>, Utpala Rani<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi Universitas Tidar, alika.ar26@gmail.com

<sup>2</sup>Program Studi Akuntansi Universitas Tidar, utpala@untidar.ac.id

---

### **Info Artikel**

Diterima , 25 Oktober  
2020

Direvisi, 14 Desember  
2020

Dipublikasi, 18 Februari  
2021

---

### **Kata Kunci:**

*Sumber daya manusia,  
laporan keuangan, Dinas  
Perumahan dan Kawasan  
Permukiman Kota  
Magelang*

---

### **Keywords :**

*Human resources,  
financial statements,  
Department of Housing  
and Residential Areas of  
Magelang City*

---

### **Abstrak**

Penulisan ini dibuat bertujuan supaya bisa mengetahui kualitas sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, dan kualitas laporan keuangan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu penulis melakukan observasi dengan cara pengamatan langsung, wawancara dan melakukan dokumentasi. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa adanya sumber daya manusia di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang menerapkan SAP dengan cukup baik dilihat dari keterandalan pengelolaan keuangan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Dalam pengelolaan dan pelaporan keuangannya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang menggunakan sistem E-Budgeting dan aplikasi SIMDA.

---

### **Abstract**

*This research aims to find out the quality of human resources, financial management, and the quality of financial reports in the Office of Housing and Residential Areas of Magelang City. This research uses qualitative methods of being descriptive. The data collection techniques in this study authors made observations by means of direct observation, interviewing and conducting documentation. The result of this study is that the human resources in the Department of Housing and Residential Areas of Magelang implement SAP quite well judging by the good ness of financial management and the precise timing of financial reporting. In the management and financial reporting of the Office of Housing and Residential Areas of Magelang City using the E-Budgeting system and SIMDA application.*

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah mempunyai fungsi krusial selama mengoptimalkan mutu sumber daya manusia agar dapat mempunyai pengetahuan, ciri, nilai, etika dan kemampuan yang bisa disokong oleh institusi kependidikan. Berbagai penerapan kebijakan oleh pemerintah di bidang pendidikan seperti program pendidikan 9 tahun dan beasiswa, di bidang kesehatan seperti asuransi jaminan kesehatan, dan di bidang sosial seperti program keluarga harapan (PKH) yang diharapkan dapat menjunjung mutu sumber daya manusia. Mutu dan kuantitas mempunyai peran penting pada sumber daya manusia dalam pelaksanaan dan keberlangsungan seluruh aktivitas di pemerintahan merupakan aspek krusial bagi organisasi. Bentuk dan tujuan organisasi disusun atas dasar perencanaan yang terstruktur guna kepentingan dan dikelola oleh manusia. Manusia menempatkan diri sebagai faktor yang sistematis untuk segala aktivitas institusi (Arizonal, dkk, 2013). Sumber daya manusia, yaitu individu yang menggerakkan organisasi melalui pekerjaan di institusi atau tugas yang mereka pikul. Untuk itu, dibutuhkan pengembangan kompetensi agar manusia mengalami peningkatan mengingat manusia merupakan aset bagi perusahaan/institusi (Madyan, 2018).

Ardiansyah (2013) mengemukakan bahwa regulasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia selalu memberlakukan perbaikan peningkatan kinerja dalam mengelola keuangan yang dilaksanakan secara bertahap dan konstan. Upaya pemerintah untuk mencapai pemerintahan yang baik yaitu dengan cara meningkatkan akuntabilitas serta transparansi selama mengelola keuangan daerah atau negara, atas dasar mengembangkan wewenang pada akuntansi pemerintah yaitu standar akuntansi pemerintah. Salah satu kunci penting dalam upaya manajemen keuangan ialah melalui upaya mengembangkan kewenangan sistem akuntansi pemerintah mempunyai tujuan guna memberi ketentuan dasar bagi proses penyusunan dan meyajikan pelaporan keuangan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat.

Laporan keuangan digunakan sebagai instrumen bagi bagian atau materi guna bertanggung jawab atas kinerja keuangan mereka bagi masyarakat luas dan didalam laporan keuangan harus berisi sebuah informasi keuangan yang berkualitas. Pada standar akuntansi pemerintah, pelaporan keuangan diartikan sebagai laporan keuangan bermutu apabila pelaporan tersebut mencakup

beberapa karakteristik yaitu andal, relevan, bisa dibandingkan, serta mudah untuk dipahami. Bidang atau disiplin ilmu akuntansi menghasilkan sebuah produk yang disebut laporan keuangan. Agar bisa melaporkan keuangan bermutu membutuhkan kemampuan manusia yang kompeten dalam proses penyusunannya. Dalam proses menyusun laporan keuangan, kualitasnya entitas pemerintah memerlukan sumber daya manusia berkemampuan baik serta dapat mengerti perihal sistem perhitungan keuangan pemerintah yaitu sistem akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi merupakan hal yang krusial atau mendasar dalam menerapkan perhitungan keuangan atau disebut dengan akuntansi di penyusunan laporan keuangan daerah. Sistem ini dapat diartikan sebagai serangkaian prosedur yaitu pencatatan, pengumpulan data, pengihkisan, dan pelaporan keuangan. Menurut Hullh dan Pontoh (2017), sumber daya manusia mempengaruhi kredibilitas hasil penyampaian laporan keuangan. Hal tersebut terjadi karena kondisi akuntansi atau manajemen keuangan telah berkontribusi serta mengimbangi para pegawai untuk melaksanakan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan akuntansi.

Badan pengawas keuangan (BPK) mempunyai tugas guna menilai laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di masing-masing tahunnya. BPK memberi pilihan wajar tanpa pengecualian (WTP) bagi LKPD yang bisa diartikan jika laporan keuangan tersaji dengan proposional dan bermutu. Beberapa macam pendapat yang biasa tersampaikan oleh pemeriksa, meliputi pendapat proposional dengan pengistimewaan, pendapat yang tidak proposional, serta pendapat yang tidak mendapatkan penilaian. Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 menjelaskan jika standar akuntansi pemerintah, yaitu pelaporan keuangan pemerintah agar dapat mewujudkan tujuan umum laporan keuangan pemerintahan, akan tetapi tidak berperan guna mencukupi kebutuhan khusus bagi pengguna.

Disusunnya laporan keuangan mempunyai tujuan khusus yang diperbolehkan jika dibutuhkan selama beracuan pada standar akuntansi pemerintahan. Tanjung (2008:8-9) menjelaskan bila tujuan disusunnya laporan keuangan, yaitu agar dapat menyajikan informasi yang wajar tentang kedudukan keuangan serta semua kegiatan betransaksi yang telah dilaksanakan pada unrus selama satu periode pemberian laporan. Utamanya, penggunaan pelaporan

keuangan bertujuan guna melakukan perbandingan belanja, perwujudan penghasilan, penganggaran yang sudah ditentukan dan transfer. Harun (2009:53) mengungkapkan bila laporan keuangan ialah instrumen pertanggungjawaban pemerintah bagi wakil rakyat di parlemen maupun institusi negara lainnya yang mempunyai kepentingan dan bagi masyarakat umum.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang ialah instansi pemerintah yang membantu walikota untuk menjalankan segala keperluan maupun kepentingan pemerintahan dalam sektor perumahan. Permukiman serta pertanahan merupakan tugas perbantuan dan wewenang daerah yang diberikan ke pemerintah daerah. Peranan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang ialah merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya.

Guna meningkatkan layanan bagi masyarakat, Pemerintah Kota Magelang membentuk Organisasi Pemerintah Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang memiliki perencanaan, yaitu 100 % kebutuhan air minum, 0 % luas daerah kumuh perkotaan, serta 100 % akses sanitasi. Terselenggaranya pembangunan infrastruktur oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupaya guna memenuhi visi RPJMD Kota Magelang periode 2016 hingga 2021, yaitu mewujudkan Kota Magelang yang modern dan cerdas agar masyarakat kian sejahtera serta religus. Lalu, misi Kota Magelang, yaitu mengoptimalkan mutu sumber daya manusia melalui pemaksimalan pada kemajuan teknologi sebagai dasar mewujudkan transparansi dan bersih pada pemerintahan daerah dan responsif pada perwujudan cita-cita masyarakat, dapat mengoptimalkan dan memanajemen potensi daerah secara efektif bagi masyarakat yang mendapat dukungan dari keikutsertaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Berdasarkan visi misi kota, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang turut mengupayakan untuk mewujudkan elemen dari masyarakat sejahtera melalui peningkatan pemerataan pembangunan prasarana perkotaan guna menyokong perencanaan pemerataan pembangunan perekonomian serta masyarakat yang sejahtera.

Program aplikasi komputer yang digunakan dalam pengelolaan keuangan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang adalah Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). SIMDA berupa suatu rencana aplikasi

yang dibuat agar bisa membantu meringankan kinerja Pemerintah Daerah selama pengaturan tata kelola dan penyusunan keuangan daerah. Adanya SIMDA pemerintah dapat melaksanakan aktivitas terkait dengan keuangan daerah secara tergabung, bermula dari penatausahaan, penentuan anggaran, sampai akuntansi dan metode laporannya (Darea dan Elim, 2015).

Penulisan ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui mutu dari sumber daya manusia, tata kelola keuangan, serta mutu pelaporan keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang. Manfaat adanya penulisan atau kajian ini, terdiri atas masyarakat mampu mendapat informasi mengenai pengaruh sumber daya manusia di pelaporan keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Kajian ini dilandaskan oleh pendekatan kualitatif, bersifat deskriptif untuk menunjukkan keadaan objek atau personalnya. Metode kualitatif, yaitu ketentuan yang memanfaatkan data deskriptif seperti kalimat langsung dari lisan maupun tertulis dari narasumber atau pihak yang dianalisis. Kualitatif bisa diperjelas sebagai sesuatu hal yang berhubungan dengan makna atau nilai di balik fenomena riil. Mutu, makna, maupun nilai bisa diperjelas menggunakan kata atau bahasa (Fitrah dan Luthfiah:44, 2017).

Pada kajian ini menggunakan data kualitatif sebagai data yang berasal melalui bermacam informasi hasil kajian, berupa fakta verbal/keterangan. Objek yang diamati adalah fisik dan non fisik Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Kota Magelang. Penelitian dilangsungkan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang selama 13 Januari 2020 hingga 13 Februari 2020.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik mengumpulkan data yaitu penulis melaksanakan observasi dengan pengamatan langsung di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang guna mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan penulisan. Metode mengumpulkan data, yaitu melalui interviu dan melakukan

dokumentasi untuk melengkapi informasi dalam penelitian. Penulis juga mendapatkan informasi dari dokumen yang diberikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang seperti dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang Periode 2016-2021.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sumber Daya Manusia Di Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Kota Magelang.

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari tiga aspek yaitu: tingkat dan latar belakang pendidikan, pengalaman dan pelatihan, dan pengetahuan dan pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Berikut hasil pengamatan mengenai kualitas sumber daya manusia di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang, dari informasi yang didapatkan oleh penulis mengenai tingkat pendidikan sumber daya manusia di instansi ini antara lain ; SD, SMP, SMU, Diploma, Strata 1, dan Strata 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang didirikan berdasar Perda Kota Magelang No, 3 Tahun 2016 perihal Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas PERKIM, yaitu bagian guna mendukung tugas kepala daerah yang dikepalai pimpinan, yaitu kepala dinas yang kedudukannya ada di bawah serta bertanggung jawab kepada walikota melalui sekda. Guna memahami sumber daya alam di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Magelang bisa diperhatikan pada tabel 1.

**Tabel 1.** Komposisi Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang sesuai Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	Pasca Sarjana/ S2	4	13,33 %
2	Sarjana/ Sarjana Muda	12	40,00 %
	a. Keuangan	1	3,33%
	b. Non keuangan	11	36,67%
3	SMA/ sederajat	9	30,00 %
4	SMP/ sederajat	3	10,00 %
5	SD/ sederajat	2	6,67 %
		30	100%

Sumber : Data Kepegawaian Dinas PERKIM Kota Magelang, 2020 diolah

Dalam tabel diatas dapat diketahui bahwa tahun 2020 jumlah pegawai atau tenaga kerja di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang sebanyak 30 orang. Untuk pegawai berpendidikan sarjana/sarjana muda menjadi kelompok dengan presentase tertinggi yaitu sebesar 40 persen dan 12 orang, dengan pendidikan di bidang keuangan yaitu sarjana/ sarjana muda jurusan akuntansi sebanyak 1 orang dan di bidang non keuangan sebanyak 11 orang.

Dalam menjalankan tugas maupun peran penting tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang terbagi atas 2 bidang, 1 sekretariat dan 1 UPTD. Latar belakang pendidikan sumber daya manusia dalam instansi ini rata-rata tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Seperti dalam bidang keuangan dan program, sumber daya manusia dalam bidang keuangan dan program rata-rata berlatar belakang pendidikan sarjana/ sarjana muda non-akuntansi (keuangan). Pengalaman dan pelatihan sumber daya manusia Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang sangat baik dikarenakan sebagian besar sumber daya manusia yang ada merupakan pegawai lama yang masa kerjanya sudah bertahun-tahun dan memiliki pengalaman bekerja dalam instansi pemerintahan. Untuk pemahaman dan pengetahuan mengenai standar akuntansi pemerintah (SAP), aparatur pelaksana harus mengerti dan memahami konsep basis-basis akuntansi serta pernyataan-pernyataan standar akuntansi pemerintahan dalam SAP pada PP Nomor 71 tahun 2010. Berdasar pada analisis yang sudah dilaksanakan, didapat informasi jika pegawai menerapkan SAP dengan cukup baik dilihat dari keterandalan pengelolaan keuangan dan tepat waktu pelaporan keuangan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang.

### **Pengelolaan Keuangan dan Kualitas Laporan Keuangan**

Guna mencapai seluruh sasaran yang ditentukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang melalui Rencana Strategis Periode 2016-2021, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang menerapkan strategi dengan menyusun beberapa kebijakan terkait penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui beberapa program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam regulasi daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pernyataan yang menjabarkan tentang penjelasan tujuan dan target yang hendak diperoleh bakal diperjelas pada

kewenangan yang disebut dengan strategi.

Tata kelola keuangan daerah berperan krusial guna menjelaskan keseluruhan kegiatan dan ketetapan politik, sosial, serta perekonomian daerah. Akuntabilitas serta transparansi tata kelola keuangan daerah adalah perwujudan dari efisiensi dan efektivitas pemberlakuan pengelolaan pemerintah yang baik. Maka akuntabilitas dan transparansi manajemen keuangan daerah mempunyai arti sebagai struktur keuangan yang mampu memfasilitasi informasi keuangan secara transparan untuk masyarakat guna memperlihatkan sistem pemerintahan yang baik serta bertanggung jawab terhadap tata kelola sumber daya maupun pemberlakuan kebijakan yang dimandatkan ke unit organisasi pemerintahan demi mencapai tujuan yang sudah ditetapkan pada pelaporan keuangan pemerintah.

Menghasilkan informasi yang berkaitan perihal kedudukan keuangan serta semua kegiatan bertransaksi yang dilaksanakan oleh elemen yang dilaporkan pada satu masa pelaporan merupakan tujuan dari pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan digunakan agar mendapati nilai dari sumber daya perekonomian yang dipergunakan demi menjalankan aktivitas operasional dalam pemerintahan, menentukan situasi atau keadaan keuangan, memperbaiki efisiensi serta efektivitas suatu elemen pelaporan, maupun memberi bantuan guna mengetahui kepatuhannya pada ketetapan undang-undang. Pelaporan keuangan bertujuan agar menyajikan informasi berkaitan dengan memanfaatkan sumber daya perekonomian/keuangan, transfer, selisih kurang maupun lebih dari pemberlakuan penganggaran, nominal dana lebih, *surplus*/defisit-laporan operasional serta arus kas suatu entitas pelaporan, aset, ekuitas, dan kewajiban.

Pelaporan keuangan dalam Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menggunakan sistem *e-budgeting*. *e-budgeting* ialah sistematisa menyusun pendanaan yang dilakukan menggunakan media elektronik. Adanya sistem ini diharapkan mampu memproteksi pelaksanaan penganggaran di sektor pemerintahan Indonesia. Aplikasi pelaporan keuangan yang digunakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang, yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah. Aplikasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) ialah aplikasi komputer yang sudah terhubung serta bisa meringankan kinerja pemerintah dalam proses pengadministrasian pemerintah daerah. SIMDA adalah bentuk cara agar dapat menyajikan ketepatan informasi guna mendukung

pengadministrasian pemerintah, layanan bagi masyarakat, menyediakan sarana untuk ikut serta, dan diskusi publik guna penetapan peraturan.

Adanya sistem dan aplikasi tersebut dapat mempermudah pengelolaan dan pelaporan keuangan dalam Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang. Namun kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam dinas perumahan serta permukiman dapat menghambat kelancaran jalannya pelaporan keuangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaporan keuangan pasti akan diadakannya input data, dalam input data membutuhkan sumber daya manusia yang bermutu sesuai kemampuan/bidang penguasaan. Peranan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan sangat penting. Dalam Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Kota Magelang, sumber daya manusianya masih belum maksimal dikarenakan sebagian besar latar belakang pendidikan sumber daya manusianya tidak sesuai dengan bidang pekerjaan mereka.

Iznillah (2015) mengemukakan bahwa manfaat yang didapat dengan adanya standar akuntansi pemerintahan yaitu dalam cakupan tata laksana bisa mempermudah peran penentuan rencana dan tata kelola serta upaya mengendalikan kekayaan, kewajiban, serta ekuitas pemerintah. Terdapat manfaat lainnya dari SAP yaitu kesetaraan antargenerasi: bisa menyampaikan informasi perihal ketercukupan pemerintah guna mendanai semua biaya pengeluaran serta generasi yang hendak datang turut menanggung beban pengeluaran itu. Pelaporan keuangan sepatutnya dirancang atas dasar pertanggungjawaban dalam melaksanakan kewenangan sumber daya guna meraih tujuan bersama.

SAP sangat penting untuk dipahami dan diterapkan oleh sumber daya manusia di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang. Demi kelancaran pengelolaan dan pelaporan keuangan harus terpenuhinya kualitas dan kuantitas SDM yang ada dalam sebuah entitas/organisasi. Masih banyak posisi jabatan atau pekerjaan yang kosong sehingga mengakibatkan beberapa pegawai harus merangkap pekerjaan yang bukan bagian mereka. Diperlukannya penambahan SDM yang berkualitas dalam Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang supaya dapat mengisi posisi jabatan yang kosong sehingga dapat melancarkan jalannya pengelolaan dan pelaporan keuangan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan jika Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang ialah instansi pemerintah yang membantu walikota untuk menjalankan segala keperluan pemerintahan dalam sektor perumahan, permukiman, serta pertanahan sebagai wewenang daerah serta tanggung jawab bagi pembantuan yang tugas pembantuan yang diamanatkan kepada pemerintah daerah. Sumber daya manusia di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang menerapkan SAP cukup baik dilihat dari keterandalan pengelolaan keuangan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Dalam pengelolaan dan pelaporan keuangannya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang menggunakan sistem *E-Budgeting* dan aplikasi SIMDA. Saran dalam penelitian ini yaitu pentingnya peran sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan dapat dilihat pada saat proses penginputan data dan pemahaman sumber daya manusia akan SAP dapat membantu kelancaran jalannya pengelolaan dan pelaporan keuangan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang. Sumber daya manusia yang berkualitas akan dapan mengelola keuangan dengan andal serta menciptakan laporan keuangan bermutu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrianti, Dita. (2010). *“Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang)”*. Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang
- Akny, Aldenila Berlianti. 2014. *Mewujudkan Good Governance melalui Reformasi Birokrasi di bidang SDM Aparatur untuk Peningkatan Kesejahteraan Pegawai. Jejaring Administrasi Publik*. Hal 416 - 427.
- Ardiansyah. 2013. *“Factors Affecting The Readiness of PP No. 71 Tahun 2010 about Government Accounting Standards (Case Study on Working Units in KPPN Malang’s Working Area)”*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol. 1, No. 1.
- Ardiansyah. 2013. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kesuksesan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB.
- Arizonal, Dika, dkk. 2013. *Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai (Studi*

- Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Malang*). Aprii STUDENT JOURNAL. Hal 1- 11.
- Bank Indonesia. 2014. *Modul Pelatihan Pengelolaan Keuangan Bank Indonesia*. Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia.
- Daera, Devita Wulandari dan Elim, Inggriani. 2015. *Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan Pada Dppka Kabupaten Kepulauan Sangihe*. Jurnal EMBA. Hal 114-122.
- Dinas PERKIM. 2016. *Rencana Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang Tahun 2016-2021*. Kota Magelang: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Magelang
- Dinas PERKIM. 2020. *Komposisi Pegawai Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Magelang Menurut Tingkat Pendidikan*. Kota Magelang: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Magelang
- Fitriah, Muh dan Luthfiyah. 2017. *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus)*. Jawa Barat: Jejak
- Harun, 2009. *Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia*. Salemba Empat.
- Hullah, A. R., & Pontoh, W. 2017. *Analisis Sumber Daya Manusia Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pada Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara* . Jurnal Accountability , 65-71
- Iznillah, M Luthfi. 2015. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Teknologi Informasi, dan Komunikasi Terhadap Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir*. Jom FEKON, Vol. 2, No. 2
- Lembaga Administrasi Negara. 2003. *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansii Pemerintah*. Jakarta:Penerbit
- Madyan. 2018. *Pemberdayaan Pondok Pesantren dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia Pesantren di Pondok Pesantren Al-Baqiyatush Shalihat Kuala Tungkal*. Smart Kids Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Hal 1-15.
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016. *Tentang Pembentukan dan Susunan Peringkat Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*
- Tanjung, A Hafiz, 2008. *Akuntansi Pemerintahan Daerah, Konsep dan Aplikasi (Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan)*. Cetakan Kedua. Alfabeta.

Bandung

Wardani, Dewi Kusuma dan Andriyani, Ika. 2017. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Klaten*. Jurnal Akuntansi. hal 88-98.